

DINAMIKA LINGKUNGAN DALAM RELIGIO POLITIK DI BALI

I Made Danu Tirta

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan

Email: madedanutirta@gmail.com

Abstrak

Praktik politik berbasis religius di Bali diharapkan menjadi kekuatan besar bagi konservasi lingkungan alam, namun praktik tersebut cenderung hanya menghantarkan kualitas lingkungan Bali dalam posisi tidak menentu. Politik berbasis religius di Bali mampu menyulut semangat konservasi, meski disatu sisi diwarnai oleh pemanfaatan lingkungan. Tulisan ini menganalisis tentang dinamika lingkungan dalam religio politik di Bali. Data dalam tulisan ini dihimpun dengan teknik observasi, studi dokumen, studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan teori tahapan kebudayaan Van Perseun. Hasil analisis yang dapat disampaikan bahwa, realitas awal dari program politik di Bali terhadap lingkungan saat ini adalah membangkitkan penghormatann terhadap mistisisme lingkungan melalui konsep *wana kerthi*, *danu kerthi*, dan *segara kerthi*. Secara perlahan, terjadi proses peralihan sikap terhadap lingkungan melalui pemisahan objek dan spirit lingkungan dengan dalih memanfaatkan lingkungan alam demi keberlanjutan spirit kebudayaan Bali lainnya. Akhirnya, Bali tetap diikuti dengan degradasi lingkungan seperti pengerukan bukit, pembangunan fisik yang merusak keaslian danau, termasuk masalah sampah. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa terjadi pemanfaatan tahapan kebudayaan oleh aktor politik dalam mengelola lingkungan Bali, sehingga dinamika lingkungan mengikuti tujuan politik pemanfaatan tahapan kebudayaan itu sendiri. Analisis terhadap dinamika lingkungan dalam religio politik di Bali, diharapkan dapat memberikan perenungan bersama utamanya bagi masyarakat adat dalam melindungi lingkungan alam secara serius, konsisten, dan terbebas dari tujuan negative politik.

Kata kunci: dinamika, lingkungan alam, politik.

Abstract

*Religious-based political practices in Bali are expected to be a major force for the conservation of the natural environment, but such practices tend to only leave the quality of Bali's environment in an uncertain position. Religious-based politics in Bali is able to ignite the spirit of conservation, although on the one hand it is colored by the use of the environment. This paper analyzes the dynamics of the environment in political religio in Bali. The data in this paper were collected by observation techniques, document studies, literature studies, and analyzed using Van Perseun's theory of cultural stages. The results of the analysis that can be conveyed that, the initial reality of the political program in Bali towards the environment today is to arouse respect for environmental mysticism through the concepts of *wana kerthi*, *danu kerthi*, and *segara kerthi*. Slowly, there is a process of shifting attitudes towards the environment through the separation of environmental objects and spirits under the pretext of utilizing the natural environment for the sustainability of other Balinese cultural spirits. Finally, Bali is still followed by environmental degradation such as hill dredging, physical development that damages the authenticity of the lake, including waste problems. Based on the results of the analysis, it can be identified that there is a utilization of cultural stages by political actors in managing the Balinese environment, so that environmental dynamics follow the political objectives of utilizing the cultural stages themselves. Analysis of environmental dynamics in the political religio in Bali, is expected to provide mutual reflection, especially for indigenous peoples in protecting the natural environment seriously, consistently, and free from negative political goals.*

Keywords: dynamics, natural environment, politics.

PENDAHULUAN

Lingkungan alam menjadi salah satu unsur kehidupan yang menyimpan berbagai isu strategis sebab menyimpan perdebatan antara ideologi ekosentris dan antroposentris (Siahaan, 2020: 1). Kedudukan lingkungan alam sebagai ruang hidup manusia, memiliki korelasi erat dengan perkembangan hidup dari manusia itu sendiri sebagai penghuni utamanya. Kondisi lingkungan alam sangat bergantung pada realitas terkini dari kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan berbagai keunggulan maupun problem lingkungan muncul kepermukaan, sebagai hasil korelasinya dengan peradaban manusia itu sendiri. Semakin konvensional kehidupan manusia, maka kecenderungan yang terjadi adalah minimnya penjamaha terhadap lingkungan. Sebaliknya, semakin tinggi peradaban hidup manusia, terlebih dihadapkan dengan modernisasi dan industrialisasi maka keberadaan lingkungan juga mendapatkan tantangan nantinya. Dengan demikian, lingkungan alam akan mampu melahirkan multirealitas.

Kompleksnya isu lingkungan juga banyak dibahas di Indonesia. Pembahasan mengenai lingkungan di negara ini cenderung tidak disebabkan oleh kemajuan lingkungan, namun lebih tertuju pada krisis lingkungan. Pembahasan lingkungan utama dari sisi krisis lingkungan di Indonesia telah terjadi sejak lama Aziz (dalam Zulfa dkk, 2016: 31) menyebutkan bahwa, permasalahan lingkungan telah menjadi perbincangan hangat di kancah nasional sejak tahun 1972. Krisis lingkungan sebagai permasalahan nasional juga mengerupsi pemerintah untuk melakukan berbagai gerakan antisipasi, untuk meningkatkan kualitas air, udara dan tanah atau lahan sebagai tiga tolak ukur utama dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Secara totalitas, upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pada tiga tolak ukur tersebut belum optimal.

Bali sebagai pulau dengan spirit Hindu memiliki pandangan tersendiri terhadap lingkungan. Konsep *tri hita karana* sebagai tiga formulasi keseimbangan dan kebahagiaan hidup manusia Hindu di Bali, salah satunya menekankan tentang harmonisasi *palemahan* (lingkungan). Harmonisasi dengan lingkungan, mutlak menuntut peran aktif manusia sebagai agen sentral dari gerakan *tri hita karana*, termasuk mengupayakan harmonisasi hidup ketika berdampingan dengan lingkungan (Wiryawan, 2006: 39).

Besarnya pandangan sakral terhadap lingkungan di Bali nampak dalam berbagai konsep kesucian yang mempergunakan unsur lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan bagi masyarakat Bali tidak saja sebatas realitas alam secara fisik, namun juga menjadi bagian penting dari pengejawantahan kepercayaan melalui simbolisme alam. Pandangan sakral terhadap lingkungan secara fisik nampak dalam aksi perlindungan terhadap pantai (*segara kerthi*), perlindungan terhadap danau (*danu kerthi*), serta perlindungan terhadap hutan atau gunung (*wana kerthi*). Disisi lain, pandangan sakral terhadap lingkungan nampak dalam strukturalisasi arah suci dalam ruang lingkungan yang disebut dengan *mandala* ataupun *ulu-teben*. Dua arah suci tersebut mampu memberikan pengaruh bagi pola kehidupan sosial

masyarakat adat di Bali ketika memposisikan hunian termasuk kegiatan sosialnya ditengah alam (*palemahan*) Bali (Budhiari dan Buchori, 2015: 31).

Kuatnya keyakinan masyarakat Bali terhadap lingkungan terkadang menjadi substansi penting dalam manajemen politik di Bali. Secara praktik politis, para aktor politik memandang bahwa konstruksi program yang mengarah pada perlindungan alam mampu menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap actor utama dari politik itu sendiri. Disisi lain, actor politik di Bali memang memiliki pandangan sakral terhadap lingkungan, sehingga keberadaan lingkungan diinternalisasikan sebagai salah satu program penting dalam perjalanan politiknya. Konteks program dalam hal ini memang ada yang menjurus pada aksi konservasi.

Program politik berbasis religi yang berpihak pada lingkungan menjadi dambaan setiap pihak. Politik dipandang sebagai kekuatan besar yang mampu menghendaki berbagai perubahan khususnya ke arah kemajuan, termasuk bagi keberadaan lingkungan alam Bali. Politik mampu mempengaruhi konstruksi yuridis yang nantinya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan alam Bali. Sehingga, tidak jarang keberadaan program politik seperti ini menjadi dambaan bagi masyarakat peduli lingkungan alam di Bali.

Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan dalam praktik politik bernafaskan religius cenderung tidak menentu. Kelestarian lingkungan sebagai tolak ukur keberhasilan konservasi lingkungan berada dalam posisi stagnan.

Tahap awal dalam dari praktik politik religius tersebut memang membangkitkan semangat konservasi lingkungan berbasis kerifan lokal Bali. Apabila semangat konservasi tersebut direalisasikan secara serius, tentunya kualitas alam Bali akan meningkat. Namun kenyataannya, peningkatan kualitas alam Bali tidak terjadi secara signifikan. Kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Bali masih terjadi. Sehingga, masyarakat terlebih pecinta alam Bali memiliki persepsi bahwa program politik berbasis religius yang banyak mewacanakan perlindungan alam Bali berdasarkan konsep lokal menjadi ruang terselebung untuk merusak tatanan lingkungan alam Bali.

Lingkungan alam dalam politik berbasis religius di Bali penting dianalisis secara lebih lanjut, mengingat didalamnya tersaji realitas dinamika dari sisi sikap terhadap lingkungan alam itu sendiri. Sakralnya lingkungan alam Bali yang kemudian menjadi objek program politik berbasis religius dari pemegang otoritas Bali, ternyata menjadi sasaran sifat dasar politik. Politik tidak selalu memiliki sifat positif, namun disatu sisi mampu berubah secara cepat maupun perlahan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan negative secara terselubung dari penguasa, sehingga kondisi lingkungan Bali juga turut berdinamika sesuai dengan proses kepentingan penguasa tersebut. Dinamika lingkungan alam di Bali nampaknya merupakan wujud kecerdikan aktor politik maupun penguasa untuk mempermainkan tahapan kebudayaan masyarakat Bali khususnya dalam pandangannya terhadap lingkungan alam.

Analisis terhadap dinamika lingkungan alam Bali terlebih dalam praktik politik berbasis religius, pada nantinya bermanfaat sebagai sumber perenungan ekologis bagi masyarakat Bali. Dinamika lingkungan alam dalam program politik cenderung terjadi secara berproses dan terselubung, sehingga jarang disadari oleh masyarakat Bali. Ulasan terhadap dinamika lingkungan tersebut nantinya memberikan referensi bagi masyarakat Bali untuk lebih kritis dan meningkatkan evaluasi bersama ketika terdapat program bersifat politik yang menyentuh lingkungan alam Bali.

Berdasarkan ulasan di atas maka tulisan ini secara spesifik menganalisis tentang dinamika lingkungan dalam religio politik di Bali. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan substansi aspek dinamika lingkungan mulai dari penghormatan mistisisme lingkungan, aksi pemisahan antara objek dan spirit lingkungan serta eksploitasi lingkungan ditengah bergulirnya praktik religio politik di Bali.

METODE

Tulisan ini mempergunakan jenis data kualitatif, yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis mempergunakan teori tahapan kebudayaan dari Van Perseun yang berpandangan bahwa terdapat tiga tahapan pokok dari kebudayaan yakni tahap mitis, tahap ontologis, dan tahap fungsionalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dianalisis secara teoritik, maka dapat disampaikan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

Penghormatan Mistisisme Lingkungan

Penghormatan terhadap mistisnya alam merupakan wajah awal dari sikap terhadap lingkungan dalam politik berbasis religius di Bali. Mistisisme lingkungan merupakan pandangan bersifat sakral dan magis terhadap lingkungan yang umumnya tertuju pada unsur alam tertentu (Rahayu dan Pamungkas, 2020: 16). Masyarakat Bali cenderung memandang lingkungan alam sebagai sesuatu yang memiliki roh, atau dalam istilah lokal disebut dengan "*penunggu*" atau "*sang madue dangka*". Pandangan seperti ini sering digaungkan pula dalam program politik dalam ranah ekologi di Bali yang dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk menghormati sekaligus menjaga sakralnya keberadaan alam Bali.

Penghormatan terhadap mistisnya alam Bali dilakukan dengan menggali konsep lokal tentang konservasi ekologis. Penguasa sentral yang notabene adalah aktor politik di Bali, berusaha secara intensif mewacanakan konsep khas Bali untuk melindungi lingkungan. Pewacanaan konsep tersebut juga dipandang sebagai bagian dari aksi keberpihakan terhadap budaya Bali. Beberapa tahun terakhir, muncul program politik dari pemimpin Bali yang secara garis besar mewacanakan tentang perlindungan terhadap tiga unsur lingkungan secara lokal

yakni *wana kerthi* (konsep perlindungan hutan dan gunung), *danu kerthi* (konsep perlindungan danau), dan *segara kerthi* (konsep perlindungan laut) (Wiana, 2018: 163).

Segenap pemerintah maupun masyarakat Bali didorong untuk menghormati dan menjaga keberadaan hutan, danau, dan laut secara bersama. Tiga unsur lingkungan tersebut dipandang sebagai unsur vital lingkungan Bali. Pandangan vital terhadap tiga unsur lingkungan Bali itu tidak hanya didasarkan pada alasan sumber daya alam maupun pariwisata, namun juga tertuju pada sisi historis mistik dan suci yang diharapkan mampu memberikan dorongan bagi manusia Hindu untuk peduli dan mencintai alam (Subawa, 2017: 51). Sehingga, ketika program perlindungan terhadap alam Bali terbentuk terjadi gerakan-gerakan sosial pemerintah dan masyarakat adat yang memang menunjukkan adanya penghormatan terhadap hutan, danau maupun laut melalui kegiatan ritual. Gerakan yang dilakukan, dinilai tidak hanya mampu melindungi alam, namun disatu sisi memberikan penghormatan terhadap besarnya jasa kekuatan lingkungan alam terhadap peradaban manusia Bali itu sendiri.

Semangat masyarakat dalam menghormati sakralnya lingkungan alam Bali mengalami penguatan. Kuatnya program politik religius yang menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan mampu memengaruhi pola pikir masyarakat adat tentang lingkungan. Pengaruh ini menguat, terlebih ketika tahap-tahap awal terbentuknya program politik berbasis religius yang secara wacana berpihak terhadap lingkungan alam Bali. Bahkan beberapa desa adat yang masih lemah dari sisi *awig palemahan*, secara cepat menyusun *awig-awig* mengenai *palemahan*. *Awig palemahan* yang disusun memuat perlindungan alam sesuai dengan unsur alam (hutan, danau, sungai, laut) yang ada di lingkungan desa adat. Disisi lain, mencantumkan dampak hukum adat apabila terjadi perusakkan lingkungan *palemahan adat* itu sendiri.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penghormatan mistisme lingkungan dalam program politik bersifat religius di Bali membangkitkan aspek spirit kebalian dari lingkungan itu sendiri. Hal ini merupakan pemanfaatan terhadap tahapan mistis dalam kebudayaan mengenai lingkungan di Bali yang dilakukan oleh aktor politik. Spirit kebalian yang dimaksud dalam hal ini adalah mewacanakan sekaligus membumikan konsep konservasi ekologis berdasarkan nafas kebudayaan lokal Bali. Konservasi ekologis berdasarkan nilai budaya Bali tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu. Melalui hal tersebut, maka muncul sebuah anggapan awal yang menyatakan bahwa program politik saat ini memang berpihak penuh bagi perlindungan lingkungan alam Bali secara universal.

Pemisahan Objek dan Spirit Lingkungan

Secara perlahan politik bersifat religius di Bali terkesan memisahkan objek dan spirit lingkungan. Objek lingkungan adalah unsur lingkungan secara fisik baik berupa bukit, hutan, sungai, danau maupun laut. Sedangkan spirit lingkungan adalah aspek mistis dari lingkungan alam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini terjadi dalam ambang antara urgensi sebuah

pembangunan atau kesengajaan memanfaatkan lingkungan alam dengan tujuan materi didalamnya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa wacana sakralnya lingkungan alam Bali selalu digaungkan, namun diiringi dengan aksi pemanfaatan secara terselubung terhadap alam Bali itu sendiri. Meminjam pendapat Akib (2013: 45) maka dapat dikatakan bahwa hal ini adalah bagian dari lemahnya yuridis pengutan lingkungan secara universal.

Pemisahan ini dilakukan melalui aksi memanfaatkan unsur lingkungan dengan dalil mendukung kebudayaan Bali lainnya. Eksistensi kebudayaan Bali memang menjadi salah satu hal urgen yang harus dilindungi. Kebudayaan Bali juga tidak luput dari manajemen politik religius. Praktik politik religius di Bali memandang bahwa kebudayaan Bali seperti seni misalnya, tidak cukup diregenerasikan melalui latihan semata, namun perlu diberikan semangat dalam bentuk pemberian ruang fisik pagelaran seni Bali secara luas. Hal ini secara langsung menuntut ketersediaan ruang lahan yang cukup, sehingga menjadikan alam lingkungan Bali sebagai sasaran untuk dimanfaatkan. Realitas ini dapat disimak pada proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Disatu sisi, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali nantinya memberikan fasilitas serta tempat yang nyaman bagi masyarakat Bali untuk menikmati berbagai klasifikasi budaya Bali. Namun, sisi lain dari pembangunan tersebut adalah menjadikan lingkungan alam Bali mengalami iritasi. Bukit Buluh yang merupakan sasaran pengerukan untuk keperluan proyek tersebut bahkan dikatakan dalam kondisi “menderita” (Sudibya, 2022: 1). Kuatnya benturan kepentingan seperti nampaknya melandasi asumsi Kopnina (dalam Siahaan, 2020: 20) yang menyentil bahwa agar semua kebutuhan manusia dapat berjalan tanpa merusak lingkungan, maka setidaknya diperlukan empat dunia untuk manusia itu sendiri.

Fenomena di atas melahirkan keambiguan dalam benak masyarakat Bali. Mengingat wacana konservasi alam Bali masih digaungkan, namun secara fakta diiringi dengan pemanfaatan alam untuk pemajuan kebudayaan tersebut. Meski demikian, usaha bijak untuk mengupayakan kemajuan kebudayaan Bali menjadi harapan besar dari masyarakat, dengan tetap menjaga kesadaran aktif untuk melaksanakan konservasi lingkungan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemisahan antara objek dan spirit lingkungan menjadi ruang peralihan dalam menyikapi lingkungan itu sendiri. Proses peralihan ini membandingkan antara pola pikir konvensional dan modern dalam mengelola lingkungan, serta dampak dari penerapan dua pola pikir tersebut. Peralihan ini pada nantinya akan menjadi tahap penentu dari realitas akhir mengenai sikap terhadap lingkungan di Bali.

Degradasi Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa degradasi lingkungan tetap mewarnai eksistensi *palemahan* Bali. Degradasi lingkungan bahkan terjadi hingga penghujung berlakunya program politik berbasis religius, yang sebelumnya gencar mensuarakan perlindungan alam Bali berdasarkan kearifan lokal. Program politis belum sepenuhnya mampu merealisasikan perlindungan alam Bali

secara maksimal dan konsisten. Pencemaran unsur lingkungan alam Bali masih gencar terjadi, meskipun praktik ritual yang bertujuan untuk menghormati lingkungan turut aktif dilakukan. Kondisi ini menjadi salah satu efek dari kekuasaan daerah untuk membangun berdasarkan program politiknya sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Utama (2016: 3) bahwa adanya keleluasan daerah untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi berpotensi mendatangkan degradasi lingkungan, sebagai dampak dari besarnya peluang “ego sektoral” dan “euphoria otonomi daerah”.

Wujud degradasi lingkungan di Bali salah satunya dapat disimak melalui aksi pengerukan terhadap beberapa perbukitan. Areal perbukitan memiliki aspek potensial untuk pembangunan akomodasi wisata. Terlebih lagi jika terdapat areal perbukitan berbatu, maka sering dijadikan sebagai objek galian untuk mendapatkan material batu sebagai komoditi yang diperdagangkan. Pengerukan areal bukit salah satunya terjadi di daerah daerah Gunaksa, Klungkung. Pengerukan ini masih bertautan dengan proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Material hasil pengerukan bukit pada nantinya akan dijual untuk mengurug eks galian C sebagai lokasi proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (Widyati, 2023: 1). Dilansir dari kanalbali.com (12 Mei 2022, hal: 1) bahkan dikatakan bahwa muncul keresahan tersendiri dari masyarakat sekitar, sebab eksistensi bukit yang dikeruk tidak saja sakral dan menyimpan banyak tempat suci, namun apabila dikeruk secara brutal maka berpotensi mendatangkan potensi bencana alam bagi penduduk disekitarnya. Kegiatan penggalian perbukitan ini secara langsung memunculkan kekecewaan tersendiri dari masyarakat terhadap program politik yang sebelumnya aktif mewacanakan perlindungan alam.

Pembangunan resto apung juga menambah sisi pelik permasalahan lingkungan danau di Bali. Resto apung dibangun secara massif. Pengembangan resto apung di tepi danau tentunya untuk pemenuhan ekonomi melalui akomodasi wisata. Pembangunan resto apung sempat marak terjadi di wilayah Danau Batur, hingga akhirnya menjadi sorotan dari beberapa tokoh dan pemerhati lingkungan di areal Danau Batur. Dilansir dari suaradewata.com (1 Maret 2023, halaman 1) dikatakan bahwa keberadaan resto apung “mencaplok” sempadan danau dan sangat memungkinkan memberikan potensi kerusakan terhadap ekosistem Danau Batur.

Air Danau Batur juga sempat mengalami pencemaran. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari penggunaan pestisida dalam aktivitas pertanian di areal danau, pendangkalan danau, termasuk pembuangan bahan kimia ke danau. Pencemaran air danau tentunya menjadi permasalahan serius yang mengancam ekosistem termasuk keberlangsungan hidup masyarakat disekitar danau. Hal ini memantik reaksi dari beberapa elit Bali di kancah nasional, dengan anggapan bahwa pemimpin Bali seharusnya tanggap secara cepat terhadap permasalahan ini, terlebih telah memiliki program unggulan yang salah satunya menekankan tentang *danu kerthi* atau perlindungan terhadap danau dan sumber mata air (Rhismawati, 2020: 1).

Masalah sampah juga terus bergulir di Bali. Meskipun telah diterbitkan aturan mengenai pembatasan sampah plastik misalnya (klasifikasi sampah terbanyak di Bali), namun pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah masih selalu terjadi. Hal ini tentunya menjadi masalah lingkungan yang harus dipikirkan secara bersama baik oleh jajaran legislative, eksekutif, termasuk masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Bali meminta Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Yasa menuntaskan masalah sampah di Bali dengan solusi tepat, sebab telah menjadi desakan masyarakat (Rhismawati, 2023: 1). Setidaknya hal ini memberikan indikasi bahwa gerakan penuntasan masalah lingkungan di Bali belum sepenuhnya berhasil dalam program politik berbasis religius yang salah satunya tertuju pada konservasi lingkungan.

Degradasi lingkungan dapat menurunkan kualitas dan citra positif *palemahan* Bali. Degradasi lingkungan tentunya identik dengan aksi perusakan secara cepat maupun lambat terhadap lingkungan. Perusakan yang dilakukan dapat menyebabkan penurunan kompleks dari kualitas lingkungan, mulai dari penurunan kualitas air, eksistensi tanah dan kekuatannya, udara, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung hal ini dapat berimbas pada turunnya kualitas hidup manusia atau *krama* Bali. Fenomena ini memberikan gambaran nyata bagi publik baik dalam tataran nasional maupun internasional terkait dengan labilnya lingkungan Bali itu sendiri.

Degradasi lingkungan yang terjadi nantinya memberikan tantangan bagi lintas generasi Bali. Kerusakan lingkungan Bali yang disebabkan minimnya etik positif terhadap *palemahan* Bali, dapat melahirkan implikasi negative secara cepat, sehingga dapat diterima oleh generasi saat ini. Disisi lain, aksi perusakan lingkungan dengan imbas yang akan dirasakan lama, maka secara langsung akan menjadi permasalahan bagi generasi mendatang.

Jadi dapat dikatakan bahwa degradasi lingkungan yang masih kerap terjadi di Bali menjadi bukti belum maksimalnya realisasi program politik berbasis religius yang banyak mewacanakan konservasi *palemahan* Bali. Tindakan murni untuk melestarikan lingkungan belum terealisasi secara maksimal. Motif negative dibalik praktik politik masih bergerak, sehingga menyebabkan perkembangan kualitas lingkungan alam di Bali stagnan. Realitas ini merupakan wujud permainan dalam ranah fungsionalis, yang ditunjukkan dengan aktifnya memfungsikan lingkungan untuk kepentingan tertentu dengan penekanan pada sisi antroposentris (dominasi manusia terhadap lingkungan).

KESIMPULAN

Pelestarian alam Bali berdasarkan budaya lokal yang sejatinya tertuju pada ekosentris (dominasi lingkungan terhadap manusia), berada dalam posisi dinamis ketika diinternalisasikan kedalam program politik berbasis religius dengan sifat antroposentris. Konsep pelestarian lingkungan Bali berdasarkan budaya lokal baru terjadi dalam ruang wacana, yang mampu membangkitkan semangat teologis terhadap lingkungan. Semangat teologis tersebut berdampingan dengan tujuan pelestarian kebudayaan Bali lain yang memerlukan pemanfaatan

ruang lingkungan, sehingga memungkinkan terjadinya merubah kondisi asli lingkungan dengan dalil menunjang kebudayaan Bali lain tersebut. Secara perlahan, aksi berlindung dibalik konservasi kompleks kebudayaan Bali dan pengembangan ekonomi pariwisata dijadikan peluang untuk mendegradasi kondisi lingkungan alam Bali. Uraian mengenai dinamika lingkungan ditengah politik berbasis religius di Bali, potensial dijadikan sebagai salah satu landasan untuk merancang formula baru penguatan lingkungan alam Bali secara serius dan konsisten, meski selalu berpeluang diinternalisasikan dalam setiap program politik setiap pemimpin Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. (2013). *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budhiari, Ni Made Dwi Sulistia., Buchori, Imam. (2015). Eksistensi konsep nilai “luan dan teben” sebagai pembagian ruang dalam level makro berdasarkan nilai tradisional bali di wilayah selatan kabupaten badung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, XI (1), hlm. 28-41.
- Kanalbali.com, (2022). *Pengerukan Bukit di Klungkung, Bali, Mulai Resahkan Warga*. <https://kumparan.com/kanalbali/pengerukan-bukit-di-klungkung-bali-mulai-resahkan-warga-1y3KgHk7amA> (Diakses, 8 November 2023).
- Rahayu, Dwi Puji., Pamungkas, Onok Yayang. 2020. Manusia, lingkungan, dan mistisisme dalam kumpulan puisi kisah pohon, pantai, dan bagian-bagiannya karya tjahjono widijanto. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, II (1), hlm. 10-18.
- Rhismawati, Ni Luh. (2020). *Mangku Pastika Soroti Kerusakan Lingkungan Danau Batur*. <https://bali.antaranews.com/berita/184070/mangku-pastika-soroti-kerusakan-lingkungan-danau-batur> (Diakses, 10 November 2023).
- Rhismawati, Ni Luh. (2023). *DPRD Bali Minta Gubernur Tuntaskan Masalah Sampah*. <https://bali.antaranews.com/berita/326709/dprd-bali-minta-gubernur-tuntaskan-masalah-sampah> (Diakses, 10 November 2023).
- Siahaan, Verdinand Robertua. (2020). *Politik Lingkungan di Indonesia: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: UKI Press.
- Suaradewata. (2023). *Warga Keluhkan Keberadaan Resto Apung di Atas Danau Batur, Satpol PP Langsung Turun Tangan*. <https://www.suaradewata.com/read/202303010023/warga-keluhkan-keberadaan-resto-apung-di-atas-danau-batur-satpol-pp-langsung-turun-tangan.html> (Diakses, 8 November 2023).
- Subawa, Putu. (2017). Pemujaan palinggi be julit di desa bestala kecamatan seririt kabupaten buleleng. *Maha Widya Duta*, I (1), hlm. 47-53.
- Sudiabya, Jro Gede. (2022). *Kontroversi Proyek Pusat Kebudayaan Bali*. <https://www.atnews.id/portal/news/14538>, (Diakses, 7 November 2023).
- Utama, I Made Arya. (2016). *Potensi Degradasi Lingkungan Hidup Bali dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wiana, I Ketut. (2018). “Sad kertih”: sastra agama, filosofi, dan aktualisasinya. *Jurnal Bappeda Litbang*, I (3), hlm. 159-180.

- Widyati, Putu Diah Kharisma. (2023). *Aktifitas Pengerukan Bukit di Klungkung Dihentikan*. <https://www.rri.co.id/bali/daerah/439482/aktifitas-pengerukan-bukit-di-klungkung-dihentikan>. (Diakses, 9 November 2023).
- Wiryawan, K.G. (2006). *Tri Hita Karana Ekologi Ajaran Hindu Benih-Benih Kebenaran*. Surabaya: Paramita.
- Zulfa, Vania. Max, Milson., Hukum, Iskar., Ilyas, Irfan. (2016). Isu-isu kritis lingkungan dan perspektif global. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, V (1), hlm. 29-40.